



**SUMBER BERITA**

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

## Herwin Apresiasi Raih WTP



H Herwin Suberhani SH MH

**BENGKULU, BE** - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2021. Opini WTP itu sudah didapatkan sebanyak 5 kali berturut-turut, sejak tahun 2017 lalu. Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, H Herwin Suberhani SH MH mengatakan, WTP yang diraih 5 tahun berturut-turut itu perlu diapresiasi.

"WTP ini sebagai apresiasi yang baik untuk Pemprov Bengkulu," terang Herwin kepada BE, kemarin (20/5).

Meski telah mendapatkan WTP, namun Herwin menegaskan, ada banyak catatan yang harus ditindaklanjuti oleh OPD. Catatan temuan BPK itu seperti permasalahan pengelolaan kas yaitu terdapat Bendahara Pengeluaran yang menyimpan uang tunai pada brankas dengan nominal melebihi ketentuan. Terdapat 236 rekening pada Bank Bengkulu sebagai BUMD Provinsi yang tidak memiliki dasar hukum.

Lalu pengelolaan persediaan yang belum memadai, pelaksanaan belanja barang dan jasa tidak sesuai ketentuan. Kemudian,

pelaksanaan belanja modal pada beberapa kontrak tidak sesuai ketentuan. Seperti kurang volume dan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi kontrak, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kontrak pekerjaan gedung, bangunan serta jalan.

"Poin-poin itu menjadi PR. Agar OPD segera tindaklanjuti, agar lebih baik ke depan," tuturnya.

Herwin juga mengatakan, setiap OPD harus bisa mendengarkan saran, kritikan dan masukan dari DPRD Provinsi Bengkulu. Karena apa yang disampaikan DPRD Provinsi itu, semua masukan dari masyarakat Bengkulu secara langsung.

"Kadang kala, poin yang kita sampaikan dengan OPD tidak direspon dengan cepat," beber Herwin.

Maka kedepan, menurut Herwin, OPD bisa lebih sigap dan cepat menanggapi masukan dari DPRD Provinsi Bengkulu. Sebab, DPRD memiliki peran penting melakukan pengawasan dan penganggaran.

"Kedepan bisa cepat dan sigap, saat diberikan masukan," tuturnya.

Tidak hanya itu, Herwin menegaskan, komunikasi OPD dengan DPRD juga harus berjalan. Khususnya untuk program infrastruktur di Provinsi Bengkulu. Ketika komunikasi berjalan, maka pembangunan yang diharapkan masyarakat bisa cepat direalisasikan.

"Harapannya, program yang sudah dirancang bisa terbangun utuh sesuai dengan rencana," tutup Herwin. (151/prw)